



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 108a/IT1.C08/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN ISTILAH  
DALAM PROSES PERANCANGAN ARSITEKTUR  
PROGRAM STUDI SARJANA ARSITEKTUR  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN (SAPPK)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa istilah-istilah dalam proses perancangan arsitektur perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bidang arsitektur saat ini dan agar sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Arsitektur SAPPK yang terus ditingkatkan untuk menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Perumusan dan Penyusunan Istilah dalam Proses Perancangan Arsitektur Program Studi Sarjana Arsitektur SAPPK;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
  5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Tim Perumus dan Penyusunan Istilah dalam Proses Perancangan Arsitektur Program Studi Sarjana Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Ir. Achmad Deni Tardiyana, MUD.  
Anggota : 1. Dr. Ir. Christina Gantini, M.T.  
2. Ir. Tri Yuwono, M.T.  
3. Dr.Eng. Hanson Endra Kusuma, S.T., M.Eng.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun daftar istilah-istilah dalam proses perancangan arsitektur yang akan didokumentasikan berupa *booklet* panduan untuk pelaksanaan mata kuliah Persiapan Tugas Akhir (PTA) dan Tugas Akhir;
- b. berkoordinasi dengan Komisi Studio dan Komisi Pendidikan Arsitektur dalam proses penyusunan panduan;
- c. mensosialisasikan daftar istilah dan panduan kepada seluruh dosen sehingga panduan dapat menjadi rujukan dan referensi bersama;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, di setiap akhir semester, kepada Ketua Program Studi dan selanjutnya Ketua Program Studi melaporkannya kepada Dekan;
- e. *Booklet* Panduan yang dihasilkan oleh tim ini pada akhir Agustus 2021 akan dicetak terbatas dan digunakan sebagai panduan untuk mata kuliah Persiapan Tugas Akhir (PTA) dan Tugas Akhir yang dimulai Semester I Tahun Akademik 2021/2022.

**KETIGA** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran SAPPK ITB dan/atau sumber lain yang sah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 1 September 2020

DEKAN,



Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.  
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Dekan SAPPK;
2. Ketua Program Studi Sarjana Arsitektur SAPPK;
3. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan Program Studi Arsitektur SAPPK;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.